

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI DARI INDEKS PERSEPSI KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI GRESIK KELAS IA PERIODE JANUARI – MARET 2023

PENDAHULUAN

Pemerintah sangat membutuhkan informasi dari unit pelayanan instansi pemerintah secara rutin dengan harapan mampu memberikan gambaran mengenai indeks persepsi korupsi, oleh karena itu Pengadilan Negeri Gresik mengadakan survey dengan menanyakan pendapat masyarakat mengenai persepsi korupsi dengan mengisi kuisioner baik secara manual maupun secara elektronik;

Diharapkan pendapat masyarakat tersebut menjadi gambaran tentang keadaan Pengadilan Negeri Gresik apakah masih melakukan praktek-praktek korupsi ataukah sudah bersih dari praktek-praktek korupsi;

Survey tersebut dilakukan atas 153 responden dengan tingkat prosentasi kategori pendidikan Sarjana 54,90% orang dengan pengguna layanan dalam kelompok usia produktif usia antara 29 tahun sampai 39 tahun;

TUJUAN

1. Sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan Survey indeks persepsi korupsi di Pengadilan Negeri Gresik;
2. Sebagai bahan masukan untuk rekomendasi tindak lanjut apabila dalam pelaksanaan Hasil Survey yang perlu ditindaklanjuti dan perbaiki layanan.

DASAR HUKUM

1. UU no. 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, korupsi dan nepotisme;
2. UU no. 31 tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi;
3. UU no. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public;
4. UU no 25 tahun 2009 tentang pelayanan public;
5. Permenpan RB No. 10 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Menti Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi no. 52 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan instansi pemerintah;
6. Peraturan Presiden RI no. 55 tahun 2012 tentang strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka panjang tahun 2012-2025 dan jangka menengah tahun 2012-2014;

7. Peraturan Presiden RI no. 2 tahun 2015 tentang rencana Pembangunan jangka menengah nasional 2015-2019

HASIL MONITORING DAN EVALUASI

Hasil Laporan Monitoring Dan Evaluasi indeks persepsi korupsi adalah sebagai berikut :

No	Monitoring	Evaluasi
1	Dari 10 ruang lingkup pelayanan secara umum menggambarkan bahwa pengguna / penerima layanan merasa layanan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Gresik dengan indeks 3,98 atau 99,44 % masuk dalam kategori PERSEPSI KINERJA UNIT PELAYANAN BERSIH DARI KORUPSI dimana nilai interval korupsi berada pada angka 81,26-100	Agar capaian tersebut tetap dipertahankan;
2	Bahwa dari ruang lingkup tersebut didapatkan 5 kategori ruang lingkup tertinggi yaitu pada pernah dihubungi petugas, tanda terima kasih, percaloan, praktek KKN, mengurus perkara diluar sidang dengan score masing-masing 4,00;	Untuk ruang lingkup yang tertinggi ada 3 ruang lingkup dengan nilai yang sama yang membuktikan bahwa Pengadilan negeri Gresik Bebas dari praktek KKN, percaloan dan tanda terima kasih, pernah dihubungi petugas , mengurus perkara diluar sidang;
3	Bahwa ruang lingkup dalam indek persepsi korupsi yang perlu ditingkatkan adalah 3 unsur terendah yaitu <ol style="list-style-type: none">1. Bukti pembayaran dengan score 3,902. Biaya Tambahan dengan score 3,933. Tarif biaya dengan score 3,95	Perlu dicermati dasar-dasar mengapa bukti pembayaran , biaya tambahan dan tariff dan biaya menjadi ruang lingkup terendah, sehingga harus dilakukan perbaikan-perbaikan layanan khususnya terhadap 3 unsur terendah

KESIMPULAN

Dari hasil monitoring mengenai indeks persepsi korupsi diperoleh Hasil terhadap 3 ruang lingkup yang mempunyai nilai tertinggi yang sama di Pengadilan Negeri Gresik yaitu pada Pernah dihubungi petugas, tanda terima kasih, Percaloan, Praktek KKN, Percaloan dan mengurus perkara diluar sidang sehingga menggambarkan bahwa pengguna jasa/penerima layanan merasa **PELAYANAN di PENGADILAN NEGERI GRESIK untuk** Pernah dihubungi petugas, tanda terima kasih, Percaloan, Praktek KKN, Percaloan dan mengurus perkara diluar sidang sudah sangat baik terlihat dari score terhadap unsur tersebut nilai rata-rata 4.00 dan **Pengadilan Negeri gresik BERSIH membuktikan** tidak Pernah dihubungi petugas, tanda terima kasih, Percaloan, Praktek KKN, Percaloan dan mengurus perkara diluar sidang namun masih terdapat ruang lingkup dengan nilai score terendah namun yaitu bukti pembayaran dengan score 3,90, biaya tambahan dengan score 3,93 dan tariff dan biaya score 3,95 namun demikian nilai terendah tersebut masuk dalam interval 3,26 - 04,00 yang artinya nilai tersebut mendekati nilai perfect yang artinya persepsi Pengadilan Negeri Gresik "**BERSIH DARI KORUPSI**";

REKOMENDASI

- Agar penggunaan anjungan mandiri dimaksimalkan agar pihak yang berperkara tidak berhadapan langsung dengan petugas;
- Agar bukti pembayaran untuk pihak yang melakukan pendaftaran secara manual diberikan kepada pengguna layanan secara langsung atau melalui pemberitahuan yang ditempel di ruang anjungan mandiri dan juga diwebsite Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas IA sedangkan bukti pembayaran secara ecourt, karena melakukan pembayaran secara elektronik sehingga bukti pembayaran telah langsung diuterdima oleh pengguna layanan;
- Untuk biaya tambahan agar dibuat pengumuman baik di ruang anjungan mandiri atau tempat ruang tunggu sidang pengumuman yang berisi Pengadilan Negeri / hubungan Industrial Kelas IA Gresik tidak pernah meminta uang

tambahan terkait pelayanan yang diberikan kepada pelanggan, mengenai tidak adanya biaya tambahan juga diumumkan di website Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik dan bagi siapa saja yang pernah diminta uang tambahan dari pegawai / petugas untuk dapat melaporkan hal tersebut dengan membuat aduan baik melalui siwas maupun ke meja pengaduan;

- Untuk Tarif dan biaya sudah dilakukan transparansi keterbukaan biaya panjar biaya perkara dan biaya Pnbp baik melalui website maupun papan pengumuman yang dapat dilihat oleh pengguna layanan;

Sekretaris



HANDRI MAHMUDI, SH.MH

Ketua TIM SURVEY



SRI SULASTUTI, SH^h